

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Devita dkk. 2014, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, ISSN: 2338- 4603, Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi
- Bastian, Indra. 2003. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta. BPFE
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat
- Halim, A. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi kedua. Yogyakarta. YKPN
- Jolianis. 2014, Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, ISSN: 2085-1057, STKIP PGRI Sumatera Barat
- Kesit Bambang Prakosa. 2004, Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY), ISSN: 1410 – 2420
- Luluk Atika Rahmawati. 2015, *Flypaper Effect* Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya
- Maimunah, M. 2006, *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra*. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang 1-7
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Andi
- Mirani dkk. 2016, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Kota Bitung tahun 2003-2015, Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Rihfenti Ernayani. 2017, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Balikpapan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta